



Katalog BPS : 7203005.34



http://yogyakarta.bps.go.id

STATISTIK KEUANGAN DAERAH REGIONAL FINANCIAL STATISTICS

Daerah Istimewa Yogyakarta 2013 - 2014



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STATISTIK KEUANGAN DAERAH
REGIONAL FINANCIAL STATISTICS
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2013-2014

ISSN : 0126.4133

No. Katalog BPS/ *Catalog Number* : 7203005.34

No. Publikasi/ *Publication Number* : 34542.15.03

Jumlah Halaman / *Number of pages* : vii + 56 Halaman / *Pages*

Penyunting/ *Editor* :

1. Ir. Haryono, M.Si.

2. Santi Wijayanti, S.Si.

Naskah/ *Manuscript* :

Paulus Henri Laksono, SST

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Financial and Producer Price Statistics Subdivision

Gambar Kulit/ *Cover Design*

Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen

Financial and Producer Price Statistics Subdivision

Diterbitkan oleh/ *Published by* :

BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

BPS – Statistics of D.I. Yogyakarta Province

Boleh Dikutip dengan menyebut sumbernya.

May be cited with reference to the source.

KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2014 merupakan kelanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang secara teratur telah diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Publikasi ini menyajikan data mengenai Realisasi APBD 2013 dan APBD 2014 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumen data, khususnya data mengenai keuangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk perbaikan publikasi di masa mendatang, tanggapan dan saran-saran dari para pemakai sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga selesainya publikasi ini, diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Maret 2015

Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
K e p a l a,

J. Bambang Kristianto, MA
NIP. 19561223 197803 1 001

P R E F A C E

The publication of Regional Financial Statistics Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014 is the continuation of previous publications published by BPS–Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta. This book presents The Daerah Istimewa Yogyakarta and Regency/Municipality Regional Government's actual revenues and expenditures.

We hope that this publication gives significant contributions to the Regional Financial of Regional Government information in Daerah Istimewa Yogyakarta. Comments and suggestions to improve the contents of this publication are always be welcomed. We would like to express our sincere thanks to those who have contributed to make this publication was released.

Yogyakarta, March 2015
BPS – Statistics of
Daerah Istimewa Yogyakarta Province
Head,

J. Bambang Kristianto, MA
NIP. 19561223 197803 1 001

DAFTAR ISI / *List of Contents*

KATA PENGANTAR / <i>PREFACE</i>	i
DAFTAR ISI / <i>List of Contents</i>	iii
I. PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Ruang Lingkup.....	1
1.3. Konsep dan Definisi	2
II. ULASAN RINGKAS	6

Tabel-Tabel / *Tables*

1. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	7
2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	10
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014	10
4. Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2013	11
5. Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.....	13
6. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	14
7. Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014	15
8. Persentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2013	16

9.	Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013	17
10.	Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014	17
11.	Persentase Belanja Tidak Langsung terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2013	18
12.	Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.....	19
13.	Persentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014.....	20
1.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	21
1.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	22
1.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	23
1.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	24
1.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	25
1.6.	Persentase Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	26

2.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014</i> (000 Rp)	27
2.2.	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2013-2014</i> (000 Rp).....	28
2.3.	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2013-2014</i> (000 Rp)	29
2.4.	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014</i> (Persen/Percent).....	30
2.5.	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2013-2014</i> (Persen/Percent).	31
2.6.	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2013-2014</i> (Persen/Percent).	32
3.1.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014</i> (000 Rp)	33
3.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2013-2014</i> (000 Rp).....	34
3.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014</i> (000 Rp)	35
3.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014</i> (Persen/Percent).....	36
3.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2013-2014</i> (Persen/Percent).	37

3.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	38
4.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	39
4.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	40
4.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	41
4.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	42
4.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	43
4.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	44
5.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	45
5.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	46
5.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	47
5.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	48

5.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	49
5.6	Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	50
6.1	Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	51
6.2	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	52
6.3	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)</i>	53
6.4	Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	54
6.5	Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	55
6.6	Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / <i>Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)</i>	56

I. PENJELASAN UMUM

I.1. Pendahuluan

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah terus berupaya untuk mendapatkan dan meningkatkan serta menggali sumber-sumber potensi daerah. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Oleh karena itu data statistik mengenai keuangan daerah menjadi semakin diperlukan dalam rangka keperluan kelengkapan informasi tentang keuangan negara, analisis dan pengambilan keputusan. Kegunaan data keuangan daerah antara lain :

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi secara makro seperti pendapatan regional, tabel input output, dan neraca arus dana.
2. Memberikan informasi tentang realisasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Untuk mengetahui potensi dan peranan sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi pemerintah pusat, untuk menentukan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk daerah.

I.2. Ruang Lingkup

Pengumpulan data statistik keuangan daerah dibedakan antara lain :

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Badan Pengelola Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

I.3. Konsep dan Definisi

I.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1.1. Pajak Daerah

Adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

1.2. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi dalam tiga bagian yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Contoh retribusi jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, dan lain-lain. Contoh retribusi jasa usaha antara lain pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan atau pertokoan, penjualan produksi usaha daerah, dan lain-lain. Contoh retribusi perijinan tertentu antara lain izin mendirikan bangunan, izin trayek, dan lain-lain.

1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan ini terdiri dari Bagi

Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1. Bagi Hasil Pajak.

Bagi hasil pajak terdiri dari bagian penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

2.2. Bagi Hasil Bukan Pajak.

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

2.3. Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

2.4. Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.

- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah penerimaan dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Penerimaan lainnya terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus serta dana bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

I.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Tak Langsung

Belanja tak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Kelompok belanja tak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

II. ULASAN RINGKAS

ANALISIS KEUANGAN DAERAH

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BERDASAR REALISASI APBD 2013 DAN APBD 2014

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan ini, maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta peningkatan ppendayagunaan potensi daerah secara optimal.

Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan memenuhi azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pertambuan. Penyelenggaraan tugas-tugas desentralisasi semakin berkembang sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Agar daerah dapat mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka perlu memiliki sumber pembiayaan yang cukup. Wujud otonomi daerah dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut pemerintah daerah agar dapat meningkatkan penerimaan dan mengoptimalkan pengeluaran.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah. Selanjutnya, berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yaitu yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data statistik keuangan daerah dapat memberikan gambaran perkembangan anggaran dan realisasi, baik penerimaan maupun pengeluaran serta analisanya yang merupakan informasi penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan melihat kemampuan atau tingkat kemandirian daerah.

Dalam Tabel 1. dapat dilihat gambaran realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013.

**Tabel 1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013**

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Surplus/Defisit (Juta Rupiah)	Ratio Pendapatan terhadap Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	2.583.056,76	2.509.643,37	73.413,39	1,03
Kab. Kulonprogo	1.003.179,22	964.587,55	38.591,68	1,04
Kab. Bantul	1.520.302,70	1.387.719,17	132.583,52	1,10
Kab. Gunungkidul	1.242.092,68	1.180.155,60	61.937,08	1,05
Kab. Sleman	1.899.525,64	1.693.528,30	205.997,34	1,12
Kota Yogyakarta	1.309.580,19	1.232.911,93	76.668,26	1,06

Dari tabel tersebut dapat kita amati, bahwa rasio pendapatan/penerimaan daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se- Daerah Istimewa Yogyakarta lebih dari satu atau mengalami surplus anggaran. Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2013 sudah dapat mencukupi kebutuhan belanja daerah.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2013 memperoleh pendapatan/penerimaan sebesar 2,58 triliun rupiah dengan total pembelanjaan mencapai besaran 2,51 triliun rupiah. Dengan demikian pada tahun 2013 Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta mengalami surplus keuangan sebesar 73,41 miliar rupiah.

Pada tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/penerimaan keuangan terbesar diantara kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu mencapai nilai 1,90 triliun rupiah. Dengan belanja sebesar 1,69 triliun rupiah membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 206 miliar rupiah pada tahun 2013.

Realisasi pendapatan/penerimaan daerah kabupaten/kota tahun 2013 yang terendah diterima oleh Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar 1 triliun rupiah. Pada tahun tersebut Kabupaten Kulonprogo menggunakan anggaran sebesar 964,59 miliar sehingga mengalami surplus sebesar 38,59 miliar rupiah.

Salah satu syarat yang diperlukan (*necessary condition*) untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah sebagaimana uraian sebelumnya, adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pemerintah daerah tersebut telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu disamping sumber pembiayaan dari pemerintah diatasnya (berupa dana perimbangan) juga sumber pembiayaan dari dalam sendiri.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, adalah daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian dan tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah yang dimasukkan dalam pos Pendapatan Asli Daerah terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah.

Jenis-jenis pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten/kota yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Besarnya persentase PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan besarnya sumbangsih PAD daerah terhadap total pendapatan daerah. Sumbangan realisasi PAD Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta tahun 2013 mencapai 38,87 persen dari total pendapatan. Semakin besar persentase PAD terhadap total pendapatan maupun terhadap total belanja, sangat diharapkan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah, karena persentase PAD terhadap belanja daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk mencukupi belanja daerah sendiri.

Sumbangan PAD masing-masing pemerintah kabupaten/kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap total pendapatan ataupun terhadap total belanja tahun 2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Pendapatan	Persentase PAD thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	2.583.056,76	2.509.643,37	1.004.063,12	38,87	40,01
Kab. Kulonprogo	1.003.179,22	964.587,55	95.991,51	9,57	9,95
Kab. Bantul	1.520.302,70	1.387.719,17	224.197,86	14,75	16,16
Kab. Gunungkidul	1.242.092,68	1.180.155,60	83.427,45	6,72	7,07
Kab. Sleman	1.899.525,64	1.693.528,30	449.270,30	23,65	26,53
Kota Yogyakarta	1.309.580,19	1.232.911,93	383.052,14	29,25	31,07

Besaran sumbangan PAD terhadap pendapatan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013 terlihat masih kecil. Dari lima kabupaten/ kota di D.I. Yogyakarta, hanya ada tiga kabupaten/kota yang sumbangan PAD-nya di atas 10 persen, yakni Kota Yogyakarta dengan sumbangan PAD sebesar 29,25 persen, Kabupaten Sleman sebesar 23,65 persen dan Kabupaten Bantul sebesar 14,75 persen. Sumbangan PAD Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul terhadap total pendapatan masih relatif kecil (di bawah 10 persen).

Tabel 3
Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta Persentasenya terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Juta Rupiah)	Persentase PAD thd Rencana Pendapatan	Persentase PAD thd Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	3.100.197,64	3.330.069,35	1.233.738,56	39,80	37,05
Kab. Kulonprogo	1.031.123,94	1.045.554,90	92.815,16	9,00	8,88
Kab. Bantul	1.687.985,46	1.734.327,11	265.128,26	15,71	15,29
Kab. Gunungkidul	1.295.207,00	1.345.370,67	90.333,15	6,97	6,71
Kab. Sleman	1.869.792,74	1.978.674,63	383.497,91	20,51	19,38
Kota Yogyakarta	1.210.102,19	1.422.093,34	404.272,61	33,41	28,43

Upaya peningkatan PAD oleh pemerintah daerah tercermin pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014, dimana persentase PAD terhadap pendapatan tahun tersebut sebagian besar kabupaten/kota meningkat dibanding persentase tahun 2013.

Dalam lima tahun terakhir upaya peningkatan PAD di masing-masing pemerintah daerah terlihat pada tabel 4. Secara umum terlihat ada peningkatan persentase PAD terhadap pendapatan daerahnya, meskipun tidak begitu besar. Kota Yogyakarta dalam lima tahun terakhir cukup berhasil meningkatkan persentase PADnya, dari 21,53 persen pada tahun 2009 menjadi 29,25 persen pada tahun 2013. Demikian juga dengan Kabupaten Sleman meningkat dari 15,78 persen pada tahun 2009 menjadi 23,65 persen pada tahun 2013. Sementara itu tiga kabupaten lainnya peningkatan persentase PAD nya tidak sebesar Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Sebaliknya untuk Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta pada dua tahun terakhir mengalami penurunan persentase PAD setelah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun tahun sebelumnya. Meskipun demikian persentase PADnya masih lebih tinggi dibandingkan pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 38,87 persen dari pendapatan daerahnya.

Tabel 4
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2013

Pemerintah Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I.Yogyakarta	50,16	53,86	54,02	46,23	38,87
Kab. Kulonprogo	6,60	7,63	6,79	8,39	9,57
Kab. Bantul	10,05	8,27	10,92	12,46	14,75
Kab. Gunungkidul	5,40	5,33	5,64	6,23	6,72
Kab. Sleman	15,78	14,88	17,29	18,94	23,65
Kota Yogyakarta	21,53	22,00	24,05	29,26	29,25

Upaya meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya penerimaan dari pendapatan asli daerah harus diarahkan pada usaha yang terus menerus dan berkelanjutan agar pendapatan asli daerah tersebut terus meningkat, sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan terhadap sumber penerimaan dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat). Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut, pada dasarnya dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pendapatan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Namun dalam rangka ekstensifikasi khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan investasi daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah selain dari PAD juga berasal dari Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, serta Lain-lain Penerimaan yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan bukan pajak. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21. Sedangkan dana bagi hasil bukan pajak bersumber dari sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi). Dasar perolehan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 5.

Sumber pendapatan lain yang sangat berperan sampai sekarang adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dua puluh enam persen (26 persen) dari penerimaan APBN (penerimaan dari minyak dan gas, penerimaan pajak serta penerimaan dari non-migas dan non-pajak)

dialokasikan untuk DAU. Sepuluh persen (10 persen) DAU dibagi ke provinsi, dan sembilan puluh persen (90 persen) dibagi ke kabupaten/kota.

Tabel 5
Dasar Perimbangan Keuangan dan Bagian Daerah menurut
Undang-undang nomor 33 Tahun 2004

Jenis Pungutan	Pemerintah (Persen)	Provinsi Bersangkutan (Persen)	Kabupaten /kota Penghasil (Persen)	Kabupaten /Kota Lain dan Provinsi Bersangkutan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. PBB ¹⁾	10,0	16,2	64,8	0,0
2. BPHTB	20,0	16,0	64,0	0,0
3. PPh pasal 25, pasal 29 dan PPh pasal 21	80,0	8,0	12,0	0,0
4. Kehutanan				
a. IHPH/IHH	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Provisi Sumber Daya Hutan	20,0	16,0	32,0	32,0
c. Reboisasi	60,0	0,0	40,0	0,0
5. Pertambangan Umum				
a. Land-Rent (iuran Tetap)	20,0	16,0	64,0	0,0
b. Royalty iuran Eksplorasi	20,0	16,0	32,0	32,0
6. Perikanan ²⁾	20,0	0,0	0,0	0,0
7. Minyak Bumi	84,5	3,1	6,2	6,2
8. Gas Bumi	69,5	6,1	12,2	12,2
9. Panas Bumi	20,0	16,0	32,0	32,0

Catatan : ¹⁾ 9 % untuk biaya pemungutan

²⁾ 80% untuk seluruh kabupaten/kota

Alokasi DAU tergantung dari bobot (tolok ukur) daerah. Penentuan Tolok Ukur (Bobot) didasarkan pada kebutuhan wilayah otonomi daerah paling sedikit dapat dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin, yang selanjutnya berkembang menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu juga didasarkan pada Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lain. Potensi ekonomi daerah yang antara lain dapat dicerminkan dari potensi penerimaan yang diterima daerah seperti potensi industri, sumber daya alam (SDA),

sumber daya manusia (SDM), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi tolok ukur penentuan DAU.

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Pada dasarnya, dengan diberlakukannya otonomi daerah, diharapkan ketergantungan daerah pada pusat tentang keuangan daerah diharapkan semakin kecil (sumbangan DAU kecil), atau dengan kata lain sumber pendapatan daerah bisa bersumber pada daerah sendiri (sumbangan PAD besar).

Tabel 6
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Realisasi Pendapatan (Juta Rupiah)	Realisasi Belanja (Juta Rupiah)	Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Pendapatan	Persentase DAU thd Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	2.583.056,76	2.509.643,37	757.056,70	29,31	30,17
Kab. Kulonprogo	1.003.179,22	964.587,55	594.978,79	59,31	61,68
Kab. Bantul	1.520.302,70	1.387.719,17	854.810,63	56,23	61,60
Kab. Gunungkidul	1.242.092,68	1.180.155,60	779.069,24	62,72	66,01
Kab. Sleman	1.899.525,64	1.693.528,30	891.589,91	46,94	52,65
Kota Yogyakarta	1.309.580,19	1.232.911,93	597.212,21	45,60	48,44

Pada tahun 2013 besarnya DAU yang dialokasikan ke Pemerintah Daerah D.I.Yogyakartasebesar 757,06 miliar rupiah atau mencapai 29,31 persen dari pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Besaran ini mampu mencukupi 30,17 persen dari belanja Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta pada tahun 2013.

Sampai tahun ke-12 diberlakukannya otonomi daerah, sumbangan DAU bagi pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta masih besar. Antara 46-63 persen pendapatan pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 diperoleh dari DAU, sementara di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014 sektor ini malah meningkat persentasenya, yaitu antara 51-65 persen, dengan rincian hampir semua pemerintah kabupaten/kota merencanakan peningkatan persentase DAU pada rencana anggarannya. Hanya Pemerintah Daerah D.I Yogyakarta yang merencanakan pengurangan persentase DAU walaupun relatif kecil pengurangannya. Dengan kondisi seperti itu, tentunya pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta sekali lagi masih perlu meningkatkan PAD nya agar ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan bisa diminimalkan.

Tabel 7
Dana Alokasi Umum (DAU), serta Persentasenya terhadap
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Pemerintah Daerah	Rencana Pendapatan (Juta Rupiah)	Rencana Belanja (Juta Rupiah)	Rencana Dana Alokasi Umum (DAU) (Juta Rupiah)	Persentase DAU thd Rencana Pendapatan	Persentase DAU thd Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	3.100.197,64	3.330.069,35	899.923,55	29,03	27,02
Kab. Kulonprogo	1.031.123,94	1.045.554,90	639.409,21	62,01	61,16
Kab. Bantul	1.687.985,46	1.734.327,11	949.252,19	56,24	54,73
Kab. Gunungkidul	1.295.207,00	1.345.370,67	847.388,29	65,42	62,99
Kab. Sleman	1.869.792,74	1.978.674,63	952.102,50	50,92	48,12
Kota Yogyakarta	1.210.102,19	1.422.093,34	618.742,35	51,13	43,51

Realisasi DAU dalam lima tahun terakhir peranannya terus menurun terhadap pendapatan daerah. Jika dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010, terlihat ada penurunan peranan DAU yang signifikan di pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada tahun 2013. Namun demikian dalam tiga tahun terakhir penurunannya cenderung melambat bahkan sempat naik pada tahun 2012 terutama di pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta relatif mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 8
Percentase Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008 - 2013

Pemerintah Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I. Yogyakarta	40,74	38,38	38,69	34,86	29,31
Kab. Kulonprogo	69,26	64,97	56,08	60,18	59,31
Kab. Bantul	64,45	58,11	52,95	57,42	56,23
Kab. Gunungkidul	71,38	65,30	59,22	63,91	62,72
Kab. Sleman	59,01	51,42	48,19	50,05	46,94
Kota Yogyakarta	55,25	48,49	45,83	46,32	45,60

Dalam format lama, belanja daerah dibedakan menjadi Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan. Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah mulai tahun 2007 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemerintahannya selama tahun 2013 menghabiskan dana 1,44 triliun rupiah (57,40 persen dari total belanja) untuk belanja tidak langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Secara umum persentase pos pembelanjaan daerah pemerintah kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta tahun 2013 sebagian besar masih digunakan untuk pos Belanja Tidak Langsung.

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Pemerintah Daerah	Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja	Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	1,440,462,296	57,40	1,069,181,078	42,60
Kab. Kulonprogo	655,320,541	67,94	309,267,005	32,06
Kab. Bantul	916,215,913	66,02	471,503,258	33,98
Kab. Gunungkidul	819,458,448	69,44	360,697,148	30,56
Kab. Sleman	1,060,168,201	62,60	633,360,096	37,40
Kota Yogyakarta	633,327,758	51,37	599,584,176	48,63

Pada tahun 2014 terlihat ada rencana penurunan yang signifikan pada persentase belanja tidak langsung di semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta merencanakan persentase belanja langsung yang lebih besar dibanding belanja tidak langsungnya.

Tabel 10
Jumlah dan Persentase Rencana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Pemerintah Daerah	Rencana Belanja Tidak Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Rencana Belanja	Rencana Belanja Langsung (Juta Rupiah)	Persentase terhadap Total Rencana Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
D.I.Yogyakarta	1,547,087,119	46,46	1,782,982,231	53,54
Kab. Kulonprogo	708,840,113	67,80	336,714,783	32,20
Kab. Bantul	1,035,223,417	59,69	699,103,690	40,31
Kab. Gunungkidul	901,484,952	67,01	443,885,722	32,99
Kab. Sleman	1,209,959,643	61,15	768,714,984	38,85
Kota Yogyakarta	597,086,572	41,99	825,006,764	58,01

Tabel 11
Percentase Belanja Tidak Langsung
terhadap Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah
di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 - 2013

Pemerintah Daerah	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
D.I.Yogyakarta	52,50	58,21	61,54	60,33	57,40
Kab. Kulonprogo	76,98	77,33	69,20	67,08	67,94
Kab. Bantul	70,25	71,62	70,94	69,06	66,02
Kab. Gunungkidul	72,03	81,10	73,18	70,91	69,44
Kab. Sleman	66,17	69,13	69,11	70,00	62,60
Kota Yogyakarta	60,54	63,75	65,24	59,57	51,37

Jika kita cermati persentase belanja tidak langsung dalam lima tahun terakhir, terlihat mulai adanya penurunan persentase pada pos ini, khususnya pada tiga tahun terakhir. Hal ini terjadi baik di Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta maupun pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dilihat dari realisasi belanja menurut fungsi belanjanya, Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta paling banyak membelanjakan anggarannya di sektor pendidikan. Hal ini bisa terlihat dari persentase belanja di sektor pendidikan yang paling tinggi dibanding sektor lainnya, bahkan Kabupaten Gunungkidul lebih dari separuh belanjanya untuk sektor pendidikan. Tiga Kabupaten lainnya yang membelanjakan anggaran terbesarnya di sektor pendidikan adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. Sektor berikutnya yang cukup besar persentasenya adalah sektor pelayanan umum, sektor kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum. Kabupaten Sleman pada tahun 2013 membelanjakan anggarannya terbesarnya pada sektor pelayanan umum, yaitu mencapai 26,52 persen terhadap total belanjanya, sedikit di atas sektor perumahan dan fasilitas umum yang sebesar 25,55 persen.

Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta banyak membelanjakan anggarannya di sektor pelayanan umum, yaitu mencapai 53,34 persen dari total belanja. Sektor lain dengan persentase besar antara lain sektor perumahan/fasilitas umum dan sektor ekonomi masing-masing sebesar 13,27 persen dan 11,82 persen.

Tabel 12
Persentase Realisasi Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	53,34	16,44	15,54	17,83	26,52	23,24
2. Ketertiban dan Keamanan	1,25	0,79	1,02	0,72	1,85	0,02
3. Ekonomi	11,82	8,00	4,99	8,15	9,71	5,30
4. Lingkungan Hidup	0,57	0,31	1,34	0,90	2,22	5,08
5. Perumahan dan Fasilitas Umum	13,27	11,65	11,27	7,68	25,55	10,20
6. Kesehatan	4,59	13,70	14,28	10,18	19,22	13,15
7. Pariwisata dan Budaya	2,86	0,47	0,73	0,73	0,90	0,80
8. Pendidikan	9,79	48,04	49,50	52,65	12,38	40,74
9. Perlindungan Sosial	2,51	0,60	1,32	1,16	1,65	1,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rencana prioritas belanja pada tahun anggaran 2014 tidak banyak berubah dibanding tahun 2013. Hal ini terlihat dari besarnya persentase masing-masing sektor belanja yang tidak jauh berbeda dibanding realisasi anggaran tahun sebelumnya. Pada rencana anggaran pemerintah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, sektor pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan sektor perumahan dan fasilitas umum masih mendapatkan porsi belanja yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Sedangkan pada Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta porsi belanja yang lebih besar masih pada sektor pelayanan umum, perumahan dan fasilitas umum dan sektor pariwisata dan budaya.

Tabel 13
Percentase Rencana Belanja Menurut Fungsinya
di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Fungsi Belanja	Provinsi DIY	Kabupaten Kulonprogo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Gunungkidul	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pelayanan Umum	50,13	15,71	15,34	17,41	19,71	25,26
2. Ketertiban dan Keamanan	0,63	0,87	1,19	1,05	1,99	0,03
3. Ekonomi	8,98	8,24	5,55	8,69	12,67	5,84
4. Lingkungan Hidup	1,57	0,29	1,67	1,47	2,13	3,47
6. Perumahan dan Fasilitas Umum	13,47	13,39	11,27	5,75	19,73	17,41
6. Kesehatan	4,81	12,72	16,21	9,91	27,29	13,51
7. Pariwisata dan Budaya	11,53	0,48	0,73	0,83	0,96	1,17
8. Pendidikan	7,15	47,72	46,69	53,67	13,91	31,62
9. Perlindungan Sosial	1,74	0,58	1,35	1,21	1,62	1,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel/Table 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	2.583.056.763	3.100.197.643
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	1.216.102.750	1.233.738.562
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	957.561.851	1.038.621.026
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	409.392.162	827.838.055
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	2.509.643.374	3.330.069.350
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	1.440.462.296	1.547.087.119
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	1.069.181.078	1.782.982.231
	Surplus / (Defisit)	73.413.389	(229.871.707)
	Pembiayaan Netto / Cost	308.606.709	229.871.707

*) Data APBD

Tabel/Table 1.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	1.216.102.750	1.233.738.562
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	1.063.314.118	1.098.908.544
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	38.043.015	36.670.322
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	40.817.517	45.505.543
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	73.928.100	52.654.153
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	957.561.851	1.038.621.026
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	94.731.183	101.565.866
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	828.334.768	899.923.550
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	34.495.900	37.131.610
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	409.392.162	827.838.055
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	2.583.056.763	3.100.197.643

*) Data APBD

Tabel/Table 1.3 Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Realization of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	1.440.462.296	1.547.087.119
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	491.077.276	525.443.856
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0	0
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	437.147.781	488.152.851
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	12.509.468	14.631.602
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa/ Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	376.702.291	378.007.606
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	123.025.480	130.851.204
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0	10.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	1.069.181.078	1.782.982.231
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	143.754.843	96.354.896
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	556.030.441	1.287.507.707
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	369.395.794	399.119.628
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	2.509.643.374	3.330.069.350

*) Data APBD

Tabel/Table 1.4 **Percentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100.00	100.00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	47.08	39.80
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	37.07	33.50
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	15.85	26.70
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100.00	100.00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	57.40	46.46
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	42.60	53.54

*) Data APBD

Tabel/Table 1.5 **Percentase Pendapatan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Receipts, in 2013-2014 (Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	47,08	39,80
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	41,16	35,45
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,47	1,18
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	1,58	1,47
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	2,86	1,70
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	37,07	33,50
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,67	3,28
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	32,07	29,03
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	1,34	1,20
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	15,85	26,70
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 1.6 Persentase Belanja Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Percentage of Daerah Istimewa Yogyakarta Government's Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	57,40	46,46
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	19,57	15,78
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	17,42	14,66
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	0,50	0,44
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions <i>Expenditures for Province/Regency/City/Village Government</i>	15,01	11,35
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	4,90	3,93
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,00	0,30
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	42,60	53,54
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	5,73	2,89
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	22,16	38,66
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	14,72	11,99
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 2.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.003.179.222	1.031.123.944
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	95.991.513	92.815.160
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	681.454.832	706.469.822
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	225.732.877	231.838.962
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	964.587.546	1.045.554.896
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	655.320.541	708.840.113
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	309.267.005	336.714.783
	Surplus / (Defisit)	38.591.676	(14.430.952)
	Pembiayaan Netto / Cost	62.880.920	14.430.952

*) Data APBD

Tabel/Table 2.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2013-2014
 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	95.991.513	92.815.160
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	8.696.477	17.122.528
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	14.986.510	16.506.006
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	8.252.584	8.860.356
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	64.055.942	50.326.270
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	681.454.832	706.469.822
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	33.581.902	19.983.311
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	594.978.790	639.409.211
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	52.894.140	47.077.300
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	225.732.877	231.838.962
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.003.179.222	1.031.123.944

*) Data APBD

Tabel/Table 2.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / Realization of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	655.320.541	708.840.113
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	589.994.606	646.498.641
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	29.917	24.518
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	17.778.918	11.421.369
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	14.057.160	9.943.355
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1.141.168	2.273.860
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	31.847.314	37.678.369
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	471.459	1.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	309.267.005	336.714.783
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	60.472.106	39.346.389
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	125.481.372	144.903.021
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	123.313.526	152.465.373
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	964.587.546	1.045.554.896

*) Data APBD

**Tabel/Table 2.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	9,57	9,00
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	67,93	68,51
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	22,50	22,48
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	67,94	67,80
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	32,06	32,20

*) Data APBD

**Tabel/Table 2.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Receipts, in 2013-2014
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	9,57	9,00
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0,87	1,66
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,49	1,60
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,82	0,86
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	6,39	4,88
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	67,93	68,51
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,35	1,94
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	59,31	62,01
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	5,27	4,57
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	22,50	22,48
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

**Tabel/Table 2.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2013-2014 / Percentage of Kulonprogo Regency Government's Expenditures, in 2013-2014
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	67,94	67,80
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	61,17	61,83
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	1,84	1,09
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1,46	0,95
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,12	0,22
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	3,30	3,60
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,05	0,10
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	32,06	32,20
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	6,27	3,76
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	13,01	13,86
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	12,78	14,58
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.520.302.696	1.687.985.458
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	224.197.864	265.128.265
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	938.492.078	1.042.469.209
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	357.612.754	380.387.984
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.387.719.171	1.734.327.107
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	916.215.913	1.035.223.417
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	471.503.258	699.103.690
	Surplus / (Defisit)	132.583.525	(46.341.649)
	Pembiayaan Netto / Cost	71.811.438	46.341.649

*) Data APBD

Tabel/Table 3.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / Realization of Bantul Regency Government's Receipts, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	224.197.864	265.128.265
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	83.232.018	70.946.200
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	27.116.286	20.725.749
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	9.508.076	9.809.856
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	104.341.484	163.646.460
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	938.492.078	1.042.469.209
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	36.484.564	32.302.651
2.2	Dana Alokasi Umum / General Alocation Fund	854.810.634	949.252.188
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Alocation Fund	47.196.880	60.914.370
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	357.612.754	380.387.984
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.520.302.696	1.687.985.458

*) Data APBD

**Tabel/Table 3.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 /
Realization of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014**
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	916.215.913	1.035.223.417
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	852.127.418	955.321.213
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	24.052	10.500
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	14.007.445	5.952.744
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	15.778.200	11.583.475
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	34.103.008	55.239.725
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	175.790	7.115.760
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	471.503.258	699.103.690
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	94.968.988	123.625.083
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	193.264.430	285.590.848
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	183.269.840	289.887.759
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.387.719.171	1.734.327.107

*) Data APBD

Tabel/Table 3.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	14,75	15,71
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	61,73	61,76
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	23,52	22,54
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	66,02	59,69
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	33,98	40,31

*) Data APBD

Tabel/Table 3.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 / Percentage of Bantul Regency Government's Receipts, in 2013-2014
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	14,75	15,71
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	5,47	4,20
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	1,78	1,23
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,63	0,58
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	6,86	9,69
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	61,73	61,76
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	2,40	1,91
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	56,23	56,24
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	3,10	3,61
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	23,52	22,54
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

**Tabel/Table 3.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014 /
Percentage of Bantul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014**
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	66,02	59,69
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	61,40	55,08
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	1,01	0,34
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1,14	0,67
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	2,46	3,19
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,01	0,41
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	33,98	40,31
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	6,84	7,13
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	13,93	16,47
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	13,21	16,71
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 4.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.242.092.675	1.295.207.003
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	83.427.448	90.333.149
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	877.414.789	932.934.542
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	281.250.438	271.939.312
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.180.155.596	1.345.370.674
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	819.458.448	901.484.952
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	360.697.148	443.885.722
	Surplus / (Defisit)	61.937.079	(50.163.671)
	Pembiayaan Netto / Cost	97.636.685	50.163.671

*) Data APBD

Tabel/Table 4.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2013-2014
 (000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	83.427.448	90.333.149
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	12.350.677	24.043.480
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	25.024.940	21.645.534
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	6.815.318	6.654.257
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	39.236.514	37.989.878
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	877.414.789	932.934.542
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	38.552.493	23.983.388
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	779.069.238	847.388.294
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	59.793.058	61.562.860
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	281.250.438	271.939.312
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.242.092.675	1.295.207.003

*) Data APBD

Tabel/Table 4.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / Realization of Gunungkidul Regency Government's Expenditures, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	819.458.448	901.484.952
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	732.809.399	820.238.960
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	26.836	18.580
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	11.489.842	6.742.420
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	22.926.164	13.410.000
1.6	Belanja bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government.	3.177.566	4.026.001
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	49.028.641	55.048.990
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0	2.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	360.697.148	443.885.722
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	42.742.862	48.315.512
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	161.581.108	235.194.827
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	156.373.179	160.375.383
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.180.155.596	1.345.370.674

*) Data APBD

**Tabel/Table 4.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	6,72	6,97
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	70,64	72,03
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	22,64	21,00
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	69,44	67,01
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	30,56	32,99

*) Data APBD

Tabel/Table 4.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Receipts, in 2013-2014 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	6,72	6,97
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	0,99	1,86
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	2,01	1,67
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,55	0,51
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	3,16	2,93
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	70,64	72,03
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	3,10	1,85
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	62,72	65,42
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	4,81	4,75
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	22,64	21,00
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

**Tabel/Table 4.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013-2014 / Percentage of Gunungkidul Regency Government's Expenditures in 2013-2014
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	69,44	67,01
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	62,09	60,97
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	0,97	0,50
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1,94	1,00
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,27	0,30
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	4,15	4,09
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,00	0,15
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	30,56	32,99
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	3,62	3,59
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	13,69	17,48
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	13,25	11,92
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 5.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.899.525.637	1.869.792.735
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	449.270.305	383.497.912
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	992.782.431	1.048.511.113
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	457.472.901	437.783.710
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.693.528.297	1.978.674.627
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	1.060.168.201	1.209.959.643
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	633.360.096	768.714.984
	Surplus / (Defisit)	205.997.340	(108.881.892)
	Pembentukan Modal Netto / Cost	225.362.129	108.881.891

*) Data APBD

Tabel/Table 5.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / Realization of Sleman Regency Government's Receipts, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	449.270.305	383.497.912
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	274.628.956	234.300.000
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	48.001.680	32.537.957
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	15.551.529	18.679.733
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	111.088.140	97.980.222
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	992.782.431	1.048.511.113
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	50.369.189	47.735.401
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	891.589.912	952.102.502
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	50.823.330	48.673.210
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	457.472.901	437.783.710
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.899.525.637	1.869.792.735

*) Data APBD

Tabel/Table 5.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014
/ Realization of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2013-2014

(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	1.060.168.201	1.209.959.643
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	909.252.019	1.051.282.076
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	28.751	144.000
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	19.518.562	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	43.239.057	24.501.796
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	21.801.063	39.944.377
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	33.366.158	34.947.553
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	32.962.591	41.167.900
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0	17.971.941
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	633.360.096	768.714.984
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	125.003.792	125.875.393
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	301.496.438	331.560.836
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	206.859.865	311.278.754
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.693.528.297	1.978.674.627

*) Data APBD

Tabel/Table 5.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	23,65	20,51
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	52,26	56,08
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	24,08	23,41
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	62,60	61,15
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	37,40	38,85

*) Data APBD

Tabel/Table 5.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014 / Percentage of Sleman Regency Government's Receipts, in 2013-2014
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	23,65	20,51
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	14,46	12,53
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	2,53	1,74
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,82	1,00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	5,85	5,24
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	52,26	56,08
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	2,65	2,55
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	46,94	50,92
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	2,68	2,60
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	24,08	23,41
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 5.6 Persentase Belanja Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2013-2014
/ Percentage of Sleman Regency Government's Expenditures, in 2013-2014
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	62,60	61,15
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	53,69	53,13
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,00	0,01
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	1,15	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	2,55	1,24
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	1,29	2,02
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1,97	1,77
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	1,95	2,08
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,00	0,91
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	37,40	38,85
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	7,38	6,36
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	17,80	16,76
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	12,21	15,73
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

Tabel/Table 6.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	1.309.580.194	1.210.102.186
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	383.052.140	404.272.608
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	658.770.839	685.422.901
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	267.757.215	120.406.677
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	1.232.911.934	1.422.093.336
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	633.327.758	597.086.572
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	599.584.176	825.006.764
	Surplus / (Defisit)	76.668.260	(211.991.150)
	Pembiayaan Netto / Cost	226.708.831	211.991.151

*) Data APBD

Tabel/Table 6.2 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Realization of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2013-2014
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	383.052.140	404.272.608
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	227.748.853	260.582.494
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	40.338.698	42.446.340
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	12.596.416	12.590.282
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	102.368.173	88.653.492
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	658.770.839	685.422.901
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	55.338.000	64.430.649
2.2	Dana Alokasi Umum / General Alocation Fund	597.212.209	618.742.352
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Alocation Fund	6.220.630	2.249.900
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	267.757.215	120.406.677
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	1.309.580.194	1.210.102.186

*) Data APBD

**Tabel/Table 6.3 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 /
Realization of Yogyakarta City Government's Expenditures,
in 2013-2014**
(000 Rp)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	633.327.758	597.086.572
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	590.478.801	532.696.929
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	75.486	32.402
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0	0
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	34.287.663	55.467.086
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	6.045.181	3.358.500
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profit's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0	0
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	2.421.465	2.531.655
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	19.162	3.000.000
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	599.584.176	825.006.764
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	123.582.680	128.926.365
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	308.921.754	426.259.056
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	167.079.742	269.821.343
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	1.232.911.934	1.422.093.336

*) Data APBD

Tabel/Table 6.4 Persentase Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts and Expenditures, in 2013-2014 (Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Daerah / Local Receipts	100,00	100,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	29,25	33,41
1.2	Dana Perimbangan / Balancing Funds	50,30	56,64
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah / Other Receipts	20,45	9,95
II	Belanja Daerah / Local Expenditures	100,00	100,00
2.1	Belanja Tidak Langsung / Indirect Expenditures	51,37	41,99
2.2	Belanja Langsung / Direct Expenditures	48,63	58,01

*) Data APBD

Tabel/Table 6.5 Persentase Pendapatan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 / Percentage of Yogyakarta City Government's Receipts, in 2013-2014
(Persen/Percent)

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Pendapatan Asli Daerah / Local Original Receipts	29,25	33,41
1.1	Pajak Daerah / Local Tax	17,39	21,53
1.2	Retribusi Daerah / Local Retribution	3,08	3,51
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan / Local Wealth Management Result	0,96	1,04
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah / Others	7,82	7,33
II	Dana Perimbangan / Balancing Funds	50,30	56,64
2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak / Portion of Tax & Non-Tax Receipts	4,23	5,32
2.2	Dana Alokasi Umum / General Allocation Fund	45,60	51,13
2.3	Dana Alokasi Khusus / Special Allocation Fund	0,48	0,19
III	Lain-lain Pendapatan Yang Sah / Other Receipts	20,45	9,95
	Jumlah Pendapatan Daerah / Total Local Receipts	100,00	100,00

*) Data APBD

**Tabel/Table 6.6 Persentase Belanja Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2013-2014 /
Percentage of Yogyakarta City Government's Expenditures,
in 2013-2014
(Persen/Percent)**

No.	Rincian / Classification	2013	2014 *)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG / Indirect Expenditures	51,37	41,99
1.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	47,89	37,46
1.2	Belanja Bunga / Profit Expenditures	0,01	0,00
1.3	Belanja Subsidi / Subsidies Expenditures	0,00	0,00
1.4	Belanja Hibah / Grant Expenditures	2,78	3,90
1.5	Belanja Bantuan Sosial / Social Expenditures	0,49	0,24
1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Profu's Portions Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,00	0,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintah Desa / Aids Financial Expenditures for Province/Regency/City/Village Government	0,20	0,18
1.8	Belanja Tidak Terduga / Unexpected Expenditures	0,00	0,21
II	BELANJA LANGSUNG / Direct Expenditures	48,63	58,01
2.1	Belanja Pegawai / Personnel Expenditures	10,02	9,07
2.2	Belanja Barang dan Jasa / Goods and Services Expenditures	25,06	29,97
2.3	Belanja Modal / Capital Expenditures	13,55	18,97
	Jumlah Belanja Daerah / Total of Local Expenditures	100,00	100,00

*) Data APBD

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183
Telp.: (0274)4342234, fax.:(0274)4342230
Homepage:<http://yogyakarta.bps.go.id>, *e-mail:*bps3400@bps.go.id